

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Kerangka Konseptual	19
E. Kerangka Teoritis	28
F. Metode Penelitian Hukum	37
G. Sistematika Penulisan	43
BAB II LANDASAN TEORI	45
A. Tindak Pidana Perpajakan	45
1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan	45
2. Karakteristik Tindak Pidana Perpajakan	46
3. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perpajakan	51
4. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan	53
5. Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perpajakan	58
B. Penghindaran Pajak	63
C. Penggelapan Pajak	67
D. <i>E-Commerce</i>	68
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	68
2. Jenis <i>E-Commerce</i>	69

3. Prinsip Perpajakan <i>E-Commerce</i>	70
4. Regulasi Perpajakan <i>E-Commerce</i>	73
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	77
A. Cara Mengidentifikasi Perbedaan Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak Ditinjau Dari Pasal 372 KUHP	77
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan	77
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-65/WPJ.04/2011 ..	79
3. Surat Bantahan Dari Wajib Pajak Nomor: 02/V/AA/2011	81
B. Upaya Pemerintah Dalam Mengendalikan dan Mencegah Tindak Pidana Penggelapan Pajak Pada Transaksi Bisnis <i>E-Commerce</i>	85
1. Wawancara dengan Pengusaha Pengembang Aplikasi	85
2. Wawancara dengan Pegawai Ditjen Pajak	86
3. Wawancara dengan Advokat Perpajakan Law Firm DAJ	89
4. Wawancara dengan Penyidik Bareskrim Polri	91
C. Perlunya Dilakukan Pemungutan Pajak Pada Transaksi Bisnis <i>E-Commerce</i> Ditinjau Dari Sisi Efisiensi dan Efektivitas	93
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	95
A. Analisis Terhadap Cara Mengidentifikasi Perbedaan Penghindaran Pajak Dan Penggelapan Pajak Ditinjau Dari Pasal 372 KUHP	96
1. Metode (Cara) Mengidentifikasi Penghindaran Pajak Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak	96
2. Metode (Cara) Mengidentifikasi Penggelapan Pajak Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak	115
B. Analisis Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Mengendalikan dan Mencegah Tindak Pidana Penggelapan Pajak Pada Transaksi Bisnis <i>E-Commerce</i>	123
1. Aspek Hukum	127
2. Aspek Penegak Hukum	134
3. Aspek Sarana/ Fasilitas	140
4. Aspek Masyarakat	141

5. Aspek Kebudayaan	142
C. Analisis Perlunya Dilakukan Pemungutan Pajak Pada Transaksi Bisnis <i>E-Commerce</i> Ditinjau Dari Sisi Efisiensi dan Efektivitas	144
1. Kewajiban Membayar Pajak Oleh Masyarakat	145
2. Kontribusi Pajak Terhadap Keuangan Negara	147
3. Urgensi Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak <i>E-Commerce</i>	149
BAB V PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	162
DAFTAR PUSTAKA	163
SURAT KETERANGAN TURNITIN	167
FORMULIR KESEDIAAN PEMBIMBING	168
TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI	169
BERITA ACARA BIMBINGAN	170
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	171

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Potensi Pajak 5 (Lima) Model Bisnis <i>E-Commerce</i>	4

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan	78
Gambar 3.2 Keputusan Ditjen Pajak Nomor: KEP-65/WPJ.04/2011	80
Gambar 3.3 Surat Bantahan Wajib Pajak Nomor: 02/V/AA/2011	82
Gambar 4.1 Kerangka Penghindaran atau Penggelapan Pajak	123